

NOTULA

Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022 dengan CSO: FITRA PATTIRO

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Jumat 28 Agustus 2020
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Agenda : Pembahasan Usulan RAN OGI Keterbukaan Anggaran

Pemimpin Rapat : Kepala Sekretariat OGI
Peserta : Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter
Direktorat Otonomi Daerah
Seknas FITRA
PATTIRO
Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi Rapat

1. Ketua Seknas Open Government Indonesia (OGI) menjelaskan singkat mengenai Open Government Partnership (OGP) dan OGI.
2. Ibu Yenti dari Seknas FITRA memberikan paparan mengenai draft usulan komitmen keterbukaan anggaran penanganan COVID-19.
 - a. Selama pandemi, ada banyak perubahan APBN untuk menutup ruang fiskal yang cukup besar untuk penanganan COVID-19. Hal ini perlu dibarengi dengan adanya keterbukaan informasi anggaran. Oleh karena itu, sumber-sumber pembiayaan realokasi perlu dibuka misalnya bersumber dari hutang atau hibah. Selanjutnya, informasi terkait alokasi dana tersebut juga perlu dibuka.
 - b. Di Kemenkeu, ada website khusus terkait anggaran pokok COVID-19. Namun, informasi yang tersedia sangat makro misalnya hanya menginformasikan kebijakan makro yang diambil pemerintah. Sementara itu, ada alokasi anggaran yang diperuntukkan pemulihan ekonomi nasional dan prasarana penanggulangan pandemi yang sampai sekarang belum diberitahukan berapa besar penyerapannya, baik dari segi lokasi dan angka real.

- c. Urgensi peningkatan dashboard anggaran COVID-19 bertumpu pada beberapa hal berikut yakni: (1) Untuk mendorong pengawasan terhadap anggaran darurat COVID-19 karena alokasi anggaran yang sedemikian besar sangat rawan dalam penyalaghunaan dan korupsi. (2) Kualitas transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah juga masih rendah. Hal ini dicerminkan dari tidak tersedianya portal informasi keterbukaan anggaran COVID-19 oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menutup akses publik dan lembaga independen untuk mendapatkan informasi yang cepat, mudah, dan murah (3) Portal informasi yang saat ini tersedia memiliki beberapa ruang perbaikan untuk mengoptimalkan fungsi *pengawasan*. Beberapa fitur yang perlu ditampilkan dalam portal informasi tersebut adalah sumber pembiayaan, penyerapan anggaran, prioritas penggunaan anggaran, dan dampaknya.
- d. Perlu ada komitmen pemerintah untuk membuka alokasi anggaran secara detail termasuk berapa yang sudah diberikan dan kemana. Usulan dari CSO adalah adanya portal informasi yang memfasilitasi keterbukaan informasi anggaran penanganan pandemi yang mampu memberikan informasi kepada publik tentang penggunaan anggaran COVID-19. Portal informasi tidak hanya mencakup perencanaan tetapi juga implementasi regular/bulanan. Implikasinya, portal informasi anggaran yang mampu memberikan informasi secara rinci akan membantu masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pengawasan dan implementasinya sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran.
- e. Adapun contoh konten yang dibutuhkan masyarakat meliputi (1) Anggaran K/L untuk COVID-19 (2) Program PEN (3) Daftar BUMN yang diurutkan berdasarkan alokasi PNM terbesar. BUMN yang ditunjuk untuk PEN COVID-19 perlu diberitakan di website. Pemerintah sudah mempublikasikan data-data APBN hingga kegiatan, tapi perlu juga mengetahui nilai alokasi untuk BUMN-nya (4) Tabel anggaran BUMN adalah rincian yang lebih detail dari kolom dari anggaran BUMN sebelumnya. Pendelegasian yang terinformasi akan membuat lebih efisien karena masyarakat dapat mengecek sendiri. Jika masyarakat

menduga-duga, maka akan muncul ketidakpercayaan pada pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat membantu dan berpartisipasi dalam pengawasan.

- f. Adanya keterbukaan informasi anggaran COVID-19 akan membuat anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Mengenai sejauh mana informasi akan dibuka, teknisnya mungkin dapat diubah, tetapi setidaknya informasi yang diperlukan bisa dicantumkan. Sebagai bagian dari masyarakat, CSO dapat melakukan pemantauan anggaran pemerintah jika informasi-informasi yang tadi disampaikan merupakan informasi yang perlu dicantumkan. *Good governance* dapat terjadi jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama
 - g. Sudah ada *pilot project* dan pendekatan pada daerah dan Bupati yang mengirimkan *Letter of Interest* pada OGP dan memiliki komitmen untuk lebih transparan.
 - h. Seknas FITRA, GIZ German, dan KPK akan mengadakan rapat diskusi dan akan mencoba mengintegrasikan hal ini dengan ditjen anggaran sehingga rapat ke depannya dapat merumuskan rencana-rencana yang lebih strategis.
 - i. Untuk desa, Seknas FITRA cukup dekat dengan desa. Walaupun pembelajaran-pembelajaran sudah ada dengan beberapa *pilot project*, mungkin perlu adanya regulasi yang memayungi ini semua. Bappenas mungkin dapat memayungi Pemda, dan Pemdesa untuk isu penyampaian informasi keuangan daerah pada publik. Hal ini akan menjadi satu pembelajaran yang sangat baik untuk kedepannya.
3. Pak Bejo dari Pattiro menambahkan beberapa poin berikut:
- a. CSO sudah berkoalisi dan menyetujui usulan ini. CSO juga akan membuat dashboard yang dapat dipakai. Namun, CSO memerlukan kontak dan link agar dashboard dapat disinergikan.
 - b. Usulan terkait hal ini bukanlah suatu hal yang baru. Hal yang diperlukan adalah perbaruan fitur-fitur yang dirasa diperlukan karena inisiatif transparansi sudah muncul di Kemenkeu. Oleh karena itu, CSO hanya mendukung inisiatif-inisiatif agar dapat dioptimalkan dengan lebih baik dalam proses membangun komitmen bersama yang nanti

dapat dibicarakan di forum-forum yang akan datang. Fitur-fitur yang muncul nantinya diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat

4. Bapak Toni dari P-KNAM menjelaskan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Anggaran sebesar 677 triliun sudah dianggarkan untuk menanggulangi COVID-19. Anggaran ini merupakan angka yang besar dan Pemerintah juga mencoba untuk menginventarisasi penanggulangan dan mengalokasikan dana.
 - b. Dalam triwulan ke-2 dan ke-3, perlu adanya waspada resesi.
 - c. Kebijakan anggaran memang harus transparan karena alokasinya yang besar dan butuh pengawasan yang mengikuti perundangan yang berlaku serta partisipasi masyarakat.
 - d. Kemenkeu sudah membuat dashboard untuk COVID-19 serta saluran informasi yang digunakan. Dalam APBN, poin penanganan COVID-19 juga sudah disampaikan secara khusus. Dalam progres Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN): Realisasi hingga 19 Agustus meliputi: Rp 7,36 Triliun untuk Kesehatan. Ini adalah upaya transparansi dari pemerintah agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Hal yang dapat dilihat dari anggaran COVID-19 adalah realisasinya, bukan perencanaanya.
5. Ibu Rosi Wediawaty Kasubdit Belanja Anggaran menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. *Refocusing* dan realokasi dimulai dari Perpres 54 dan berubah menjadi Perpres 72 yang baru selesai di akhir bulan Juli 2002.
 - b. Data yang disampaikan di dashboard relatif makro karena semua masih dalam proses. Informasi yang bisa diberikan adalah penganggaran yang sudah terjadi, bukan anggaran yang direncanakan karena dalam konteks pandemi.
 - c. Informasi yang diberikan Kemenkes sudah cukup bagus dengan waktu yang cukup singkat. Realisasi anggaran juga selalu disampaikan kepada publik.
 - d. Misalnya, ada bantuan 600 ribu pe-rbulan untuk pegawai bergaji di bawah 5 juta. Hal yang diperlukan K/L adalah kebijakan, tapi daftar kebijakan sudah tercantum lengkap di kemenkeu.go.id bagian COVID-19.

- e. Dalam praktiknya, hal ini akan rumit karena anggaran biasanya tidak sama persis dengan alokasi. Anggaran yang sekarang dibuat agar fleksibel karena pasti nantinya ada penambahan dan kekurangan.
6. Ibu Alen Ermanita dari Dit. Otda Bappenas menanggapi usulan capaian sebagai berikut:
- a. Perlu adanya pelibatan K/L lain yang berkaitan karena data-data yang berkesinambungan nantinya tidak akan membingungkan pemerintah daerah.
 - b. Perlu adanya transparansi data penerima bantuan karena masyarakat yang merupakan *beneficiary* terakhir. Mereka juga berhak perlu mengetahui data penerima.
 - c. Kemenkeu sudah memiliki portal informasi, tapi perlu ada kesepakatan dari Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa jika usulan ingin diteruskan dan dijalankan di tahun 2021.
 - d. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatannya. Jika ada matriks dengan ekspektasi seperti itu, apakah akan dimanfaatkan dengan baik.
 - e. Perlu adanya integrasi data keuangan antar K/L. Namun, jika integrasi hingga level desa atau Pemda, kita tidak bisa memaksakan kapasitas mereka.
7. Bapak Eryn dari Seknas FITRA menambahkan bahwa program ini menjadi penting karena hal ini adalah babak baru yang diinisiasi dari Kemenkeu. Belum adanya dashboard untuk kebencanaan juga perlu dipertimbangkan, sehingga perlu adanya *prototype* agar kedepannya agar Indonesia lebih siap dalam menghadapi bencana.

III. Tindak Lanjut

- 1. Usulan disinergikan dengan rencana kerja pemerintah dan RPJMN karena nantinya dashboard dan konten yang diusulkan akan dicantumkan dalam platform yang sudah ada.
- 2. Rapat selanjutnya akan mengundang K/L terkait terutama Kemenkeu.

IV. Dokumentasi

